



LAPORAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN II TAHUN 2024

BBKK SOEKARNO HATTA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan baik (*good governance*) akan memberikan dampak positif dalam rangka meningkatkan reputasi BBKK Soekarno Hatta. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi Publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Pemberlakukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik berkewajiban membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Kementerian kesehatan sebagai badan publik memiliki obligasi untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah dan mudah.

Dukungan BBKK Soekarno Hatta dalam penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BBKK Soekarno Hatta No. HK.02.03/C.IX.6/17/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta.

Pengelolaan dan pelayanan informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID harus selalu dilakukan monitoring dimana hasil monitoring tersebut sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi Publik.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang merupakan revisi Kepmenkes Nomor 708/Menkes/SK/VIII/2010.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/Menkes/Per/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 182/Menkes/SK/V/2012 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

C. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui hasil layanan informasi publik apakah sudah berjalan dengan baik atau belum dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi sehingga dapat meningkatkan layanan informasi kepada Publik.

D. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan infomasi publik Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2024.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan informasi Publik dilaksanakan melalui observasi dan menggunakan dokumen/laporan yang disampaikan.

E. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

BBKK Soekarno Hatta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Dukungan BBKK Soekarno Hatta dalam penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BBKK Soekarno Hatta No. HK.02.03/C.IX.6/17/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta.

2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di BBKK Soekarno Hatta diantaranya:

a. Pelayanan Terpadu

Merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pelayanan Terpadu ini berlokasi di lantai 1 area pelayanan BBKK Soekarno Hatta.

b. Website

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi publik secara mudah, murah, cepat dan akurat, BBKK Soekarno Hatta telah membangun akses informasi bagi publik melalui website dengan alamat www.bbkksoetta.com. Dalam website ini terdapat layanan yang langsung dapat digunakan oleh publik melalui aplikasi SINKARKES salah satunya yaitu pendaftaran vaksinasi internasional secara online dan form pengaduan masyarakat. Selain itu terdapat *microsite* khusus PPID yaitu <https://ppid.kkpsoetta.com/>

c. Saluran Komunikasi Lain

- Telepon : (021) 5507989 atau 5506068
- Faksimili : (021) 5502277
- Whatsapp Center : 081574701266
- Email : bbkksoetta@gmail.com
- Surat : Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta, Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta
- Media Sosial : Facebook, Instagram, Youtube

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pemberian informasi publik dilakukan oleh pranata humas dan dibantu dengan tim pengelola media sosial.

4. Hasil Layanan Informasi Publik

Tabel 1
Permohonan Informasi BBKK Soekarno-Hatta
Berdasarkan Sumber Permohonan Informasi
Triwulan II Tahun 2024

Bulan	Sumber Permohonan Informasi				
	Pelayanan Terpadu	Email	Pesan (Whatsapp)	Medsos (IG dan FB)	Microsite PPID
April	0	81	38	6	0
Mei	0	94	49	15	0
Juni	0	106	38	12	0
Jumlah	0	281	125	33	0

Dari tabel diatas diketahui bahwa permohonan informasi ke BBKK Soekarno Hatta berasal dari email, pesan (Whatsapp), dan instagram. Jumlah permohonan informasi melalui email lebih banyak daripada pesan (Whatsapp) dan medsos (Instagram dan facebook), hal ini dikarenakan banyaknya Fasyankes (RS dan Klinik) yang menanyakan mengenai tata cara mengurus ijin klinik penerbit ICV di bawah binaan BBKK Soekarno Hatta . Sedangkan permohonan informasi melalui pelayanan terpadu secara langsung dan microsite PPID belum ada.

Tabel 2
Rekapitulasi Layanan Informasi Publik BBKK Soekarno-Hatta
Triwulan II Tahun 2024

Bulan	Total Layanan Informasi	Status		
		Dipenuhi	Ditolak	Proses
April	125	V	-	-
Mei	158	V	-	-
Juni	156	V	-	-
Jumlah	439			

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat 439 permintaan layanan informasi dengan hasil seluruhnya (100%) sudah terselesaikan. Permintaan informasi terbanyak yaitu pada bulan Mei 2024.

Adapun jenis permohonan informasi terkait hal berikut :

- Prosedur, pertanyaan, ketersediaan layanan vaksinasi
- Prosedur penerbitan surat laik terbang
- Progress pengajuan ICV dan perpanjangan ijin klinik
- Sertifikat Webinar HKKN 2024
- Permohonan kerjasama universitas
- Kroscek angsuran pegawai
- Prosedur menjadi klinik binaan vaksinasi KKP Soekarno-Hatta
- Permohonan magang

F. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil monitoring tidak ditemukan kendala atau permasalahan dalam implementasi keterbukaan publik pada Triwulan II Tahun 2024. Adapun upaya peningkatan keterbukaan publik dengan memperbarui daftar informasi yang diunggah pada microsite PPID.

G. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan infomasi publik BBKK Soekarno Hatta Triwulan II Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID BBKK Soekarno-Hatta.

Tangerang, 01 Juli 2024

Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan
Zona Integritas



Fitri Darsah, SKM, M.Kes

NIP 197001111994031002